

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Bab kedua ini berisi tentang teori dan konsep yang digunakan sebagai rujukan berfikir dan analisis. Secara garis besar bagian kajian pustaka ini menguraikan teori dan konsep mengenai pengendalian internal disuatu organisasi.

2.1.1 Audit

(Agoes, 2018) Audit merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

(Mulyadi, 2016) suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan, ditinjau dari sudut profesi akuntan publik, audit adalah pemeriksaan secara objektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam suatu hal yang material, posisi keuangan, dan hasil usaha perusahaan atau organisasi tersebut.

Standar audit merupakan pedoman umum untuk membantu

auditor dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya sehubungan dengan audit yang dilakukan atas laporan keuangan historis kliennya. Standar ini mencakup pertimbangan mengenai kualitas profesional, seperti kompetensi dan independensi, persyaratan pelaporan, dan bahan bukti audit. Standar audit yang berlaku umum (GAAS) dapat dibagi menjadi tiga kategori berikut: (Tian, 2021)

1. Standar Umum

- a. Audit harus dilakukan oleh orang yang sudah mengikuti pelatihan dan memiliki kecakapan teknis yang memadai sebagai auditor.
- b. Auditor harus mempertahankan sikap mental yang independent dalam semua hal yang berhubungan dengan audit.
- c. Auditor harus menerapkan kemahiran professional dalam melaksanakan audit dan Menyusun laporan.

2. Standar Pekerja Lapangan

- a. auditor harus merencanakan pekerjaan secara memadai dan mengawasi semua asisten sebagaimana mestinya.
- b. Auditor harus memperoleh pemahaman yang cukup mengenai entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internal untuk menilai resiko salah saji material dalam laporan keuangan karena kesalahan atau kecurangan, dan selanjutnya untuk merancang sifat, waktu, dan luas prosedur audit.
- c. Auditor harus memperoleh cukup bukti audit yang tepat dengan melakukan prosedur audit agar memiliki dasar yang layak untuk memberikan pendapat menyangkut laporan keuangan yang diaudit.

3. Standar Pelaporan

- a. Auditor dalam laporan auditnya harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum.
- b. Auditor dalam laporan auditnya harus mengidentifikasi mengenai keadaan dimana prinsip akuntansi tidak secara konsisten diikuti selama periode berjalan dibandingkan dengan periode sebelumnya.
- c. Jika auditor menetapkan bahwa pengungkapan secara informatif belum memadai, auditor harus menyatakannya dalam laporan audit.
- d. Auditor dalam laporan auditnya harus menyatakan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau menyatakan bahwa suatu pendapat tidak dapat diberikan. Jika auditor tidak dapat memberikan suatu pendapat, auditor harus menyebutkan alasan-alasan yang mendasarinya dalam laporan audit. Dalam semua kasus, jika nama seseorang auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, auditor tersebut harus secara jelas (dalam laporan auditor) menunjukkan sifat pekerjaannya dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor bersangkutan.

2.1.2 Pengendalian Internal

(Nurhidayah, 2022) pengendalian internal merupakan hal yang penting dalam upaya perwujudan pengelolaan suatu entitas dengan baik, dalam pelaksanaan pengendalian internal dilakukan perencanaan organisasi dan tindakan langkah kebijakan oleh entitas agar tercipta perlindungan aset dan pemantauan kegiatan operasional yang berjalan sesuai dengan prosedur kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Audit internal merupakan salah satu bagian dalam pelaksanaan pengendalian internal baik bersifat operasional ataupun *financial* dimana tujuan pelaksanaan audit internal adalah untuk membantu manajemen entitas dalam penilaian atau evaluasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan entitas dan dilaksanakan secara sistematis.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 ditegaskan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Keberhasilan pengendalian internal sangat tergantung pada komponen-komponen pengendalian internal. (Sudarmanto, 2021)

Auditor harus mendokumentasikan pemahamannya tentang komponen pengendalian intern entitas yang diperoleh untuk merencanakan audit. Bentuk isi dokumentasi dipengaruhi oleh ukuran dan kompleksitas entitas, serta sifat pengendalian intern entitas. Sebagai contoh, dokumentasi pemahaman tentang

pengendalian intern entitas yang besar dan kompleks dapat mencakup bagan alir (flowchart), kuesioner, atau tabel keputusan. Namun untuk entitas yang kecil, dokumentasi dalam bentuk memorandum sudah memadai. Umumnya, semakin kompleks pengendalian intern dan semakin luas prosedur yang dilaksanakan, seharusnya semakin luas dokumentasi yang dilakukan yang dilakukan oleh auditor (Agoes, 2018). Ada tiga cara yang bisa digunakan akuntan publik, yaitu:

1. *Internal Control Questionnaires*

Cara ini banyak digunakan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), karena dianggap lebih sederhana dan praktis. Biasanya KAP sudah memiliki satu set ICQ yang standar, yang bisa digunakan untuk memahami dan mengevaluasi pengendalian intern di berbagai jenis perusahaan. Pertanyaan-pertanyaan dalam ICQ diminta untuk dijawab Ya(Y), Tidak (T), atau Tidak Relevan (TR). Jika pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah disusun dengan baik, maka jawaban “Ya” akan menunjukkan ciri *internal control* yang baik, “Tidak” akan menunjukkan ciri *internal control* yang lemah, “Tidak Relevan” berarti pertanyaan tersebut tidak relevan untuk perusahaan tersebut.

2. *Bagan Arus (Flow Chart)*

Flow chart menggambarkan arus dokumen dalam sistem dan produser di suatu unit usaha, misalnya dalam flow chart untuk sistem dan prosedur pembelian, utang dan pengeluaran kas, digambarkan arus dokumen mulai dari permintaan pembelian (*purchase requisition*), order pembelian (*purchase order*) sampai dengan pelunasan utang yang berasal dari pembelian tersebut.

Untuk auditor yang terlatih baik, penggunaan *flow chart* lebih disukai, karena auditor bisa lebih cepat melihat apa

saja kelemahan-kelemahan dan kebaikan-kebaikan dari suatu sistem dan prosedur. Untuk penugasan tahun-tahun berikutnya, auditor harus selalu memutakhirkan (*mengupdate*) *flow chart* tersebut untuk mengetahui apakah terdapat perubahan-perubahan dalam sistem dan prosedur perusahaan.

Setelah *flow chart* dibuat, auditor harus melakukan *walk through*, yaitu mengambil dua atau tiga dokumen untuk mengetes apakah prosedur yang dijalankan sesuai dengan apa yang digambarkan dalam *flow chart*. Misalnya ambil satu set dokumen untuk pelunasan utang yang berasal dari pembelian persediaan secara kredit. Periksa apakah semua dokumen (*purchase requisition, purchase order, receiving report, supplier invoice dan cash payment voucher*) sudah di proses sesuai dengan prosedur yang digambarkan dalam *flow chart* pembelian, utang dan pengeluaran kas.

3. *Narrative*

Dalam hal ini auditor menceritakan dalam bentuk memo, sistem dan prosedur akuntansi yang berlaku di perusahaan, misalnya prosedur pengeluaran kas. Cara ini biasa digunakan untuk klien kecil yang pembukuannya sederhana.

Komponen pengendalian internal adalah unsur-unsur yang harus ada dalam pengendalian internal. Beberapa komponen dalam pengendalian internal adalah:

1. Lingkup Pengendalian (*Control Enviroment*), yaitu tindakan kebijakan dan sikap manajemen puncak (*top management*), para direksi yang menunjukkan faktor-faktor:
 - a. Integritas dan nilai etika organisasi
 - b. Parameter-parameter pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi dalam mengelola organisasinya.

- c. Struktur organisasi, tugas, wewenang dan tanggung jawab.
- d. Proses untuk menarik, memajukan, dan mempertahankan individu yang kompeten.
- e. Ketegasan berkenaan patokan kinerja, insentif, dan penghargaan guna meningkatkan akuntabilitas kerja.

1. *Risk Assessment* (Penaksiran risiko)

Penaksiran risiko merupakan proses identifikasi dan melakukan analisa terhadap risiko yang dapat menghambat dalam pencapaian tujuan organisasi. Penilaian risiko harus bisa diperbaiki dari awal (*looking forward process*) yaitu untuk menjamin bahwa Tindakan tidak akan menyimpang dari peraturan dan tujuan organisasi yang meliputi hal-hal:

- a. Mengestimasi tingkat signifikansi risiko
- b. Menilai kemungkinan atau frekuensi dari risiko tersebut akan terjadi
- c. Mempertimbangkan bagaimana risiko patut dikendalikan dan menilai Tindakan-tindakan yang patut dilakukan.

2. *Control activities* (Kegiatan pengendalian)

Kegiatan pengendalian merupakan tanggapan dari manajemen terhadap risiko yang teridentifikasi sebagai bagian dari tahap manajemen risiko. Perusahaan dapat merancang prosedur dan kebijakan untuk mengurangi kecurangan dan mengidentifikasi risiko yang dihadapi perusahaan.

3. *Information and communication* (Informasi dan komunikasi)

Informasi dan komunikasi sangat penting dalam pengendalian internal agar pertukaran informasi antar entitas dapat diterima dengan baik oleh seluruh karyawan.

4. *Monitoring* (Pemantauan)

Pemantauan dilakukan secara berulang untuk memeriksa sistem pengendalian guna memastikan bahwa risiko yang ditanganinya masih relevan dan terkendali secara efektif. Pemantauan sebaiknya dilakukan dengan kontinu dan periodik oleh manajemen. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa pengendalian internal telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan sudah dimodifikasi sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi yang ada. Selanjutnya, (Mulyadi, 2014) menyatakan komponen-komponen atau unsur-unsur dalam pengendalian internal adalah:

- a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.
- b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya.
- c. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit dan organisasi.
- d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab.

2.1.3 Pendapatan

(Kieso, Weygandt dan Warfield 2018) pendapatan adalah “Arus masuk atau peningkatan lainnya atas aktiva sebuah entitas atau pelunasan kewajiban selama suatu periode dari pengiriman atau produksi barang, penyediaan jasa atau aktivitas-aktivitas lain yang merupakan operasi utama atau operasi sentral perusahaan”. Pendapatan adalah sebagai manfaat ekonomi selama periode yang timbul dalam aktivitas normal saat arus kas masuk yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, selain meningkat berkaitan dengan kontribusi dari pemegang saham (Kieso, Weygandt dan Warfield 2018)

Menurut PSAK No. 23 revisi 2015, Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari pelaksanaan aktivitas entitas yang normal dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga, dividen, royalti, dan sewa.

Pengakuan pendapatan dengan mengacu pada tingkat penyelesaian dari suatu transaksi sering disebut sebagai metode presentase penyelesaian. Dengan metode ini, pendapatan diakui dalam periode akuntansi pada saat jasa diberikan. Pengakuan pendapatan atas dasar ini memberikan informasi yang berguna mengenai tingkat kegiatan jasa dan kinerja dalam suatu periode. Tujuan pengakuan pendapatan adalah untuk mengetahui seberapa besar pendapatan yang menjadi pendapatan pada periode tertentu atau yang bersangkutan dan untuk mengetahui berapa besar pendapatan yang diterima dimuka. (Mokoginta, 2019).Pendapatan dapat diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima. Jumlah pendapatan yang timbul dari transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara entitas dengan pembeli atau pengguna aset tersebut. Jumlah tersebut diukur pada nilai wajar yang diterima atau dapat diterima dikurangi diskon dagang dan rabat volume yang

diperbolehkan oleh entitas. Kriteria pengakuan dalam pernyataan ini biasanya diterapkan secara terpisah pada setiap transaksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kriteria pengakuan tersebut pada komponen-komponen yang dapat diidentifikasi secara terpisah dari suatu transaksi tunggal, agar mencerminkan substansi dari transaksi tersebut. Sebaliknya, kriteria pengakuan diterapkan pada dua atau lebih transaksi bersama-sama jika transaksi tersebut terkait sedemikian rupa sehingga pengaruh komersilnya tidak dapat dimengerti tanpa melihat pada rangkaian transaksi tersebut. (Mokoginta, 2019)

Secara Keseluruhan jenis pencacatan pengakuan pendapatan ada 2, yaitu:

1. Dasar Akrual (*Accrual Basis*)

Untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pengguna tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga liabilitas pembayara kas dimasa depan serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Laporan keuangan menyediakan jenis informasi transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.

2. Dasar Kas (*Cash Basis*)

Cash basis dalam (Kieso, Weygandt dan Warfield 2013) adalah dasar pencatatan perusahaan dimana pendapatan diakui ketika kas diterima dan beban dicatat ketika kas dibayarkan. Kini sebagian besar perusahaan tidak menggunakan pencatatan berdasarkan atas dasar cash basis yang tidak mengakui adanya prinsip pengakuan pendapatan dan prinsip pengakuan beban.

2.2 Review Penelitian Terdahulu

(Sohardi, dkk, 2019) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa Pengaruh yang signifikan pandemik pandemik covid-19 terhadap kinerja karyawan pariwisata di Jakarta. Semakin lama pandemik covid-19, maka semakin berpengaruh pada penurunan kinerja karyawan pariwisata. Indikator pandemik covid-19 yang paling dominan adalah resiko inheren penularan covid-19 dibandingkan dengan indikator lainnya seperti *massive testing*, *equipment availability* dan protokol kesehatan. Indikator kinerja karyawan yang paling dominan adalah kinerja tugas atau task performance dengan cara *work from home and work from office* apabila dibandingkan dengan indikator lainnya seperti kinerja adaptif atau adaptive performance and kinerja kontekstual atau *contextual performance*. Penutupan sementara tempat wisata dan hiburan berdampak negatif pada penurunan kinerja karyawan pariwisata seperti pengurangan karyawan, pemotongan gaji dan insentif serta pemutusan hubungan kerja (PHK). Pengaruh pandemik covid-19 terhadap pendapatan tempat wisata di Jakarta. Semakin lama pandemik covid-19, maka semakin berpengaruh pada penurunan pendapatan pendapatan tempat wisata. (Rosita, 2020) Pandemi corona (covid-19) telah membuat banyak sektor terpuruk, termasuk sektor UMKM. Dampak covid-19 telah merusak rantai pasokan, penurunan kapasitas produksi, penutupan pabrik, hingga

larangan bepergian. (Religia, Pratomo, 2014).

(Mamuaja, 2016) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa Sistem Pengendalian Internal yang diterapkan oleh Dinas Pendapatan Asli Daerah telah efektif dalam menunjang kinerja instansi pemerintah sesuai dengan unsur-unsur dalam sistem pengendalian intern pemerintah UU 60 Tahun 2008. (Homenta dan Afandi, 2015) Hasil penelitian menunjukkan sistem pengendalian intern penerimaan pajak daerah pada DPPKAD Kabupaten Halmahera Utara masih terdapat ketidaksesuaian dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008, karena masih ditemukan beberapa kelemahan yaitu: berhubungan dengan Sumber Daya Manusia yang masih kurang di bidang pendapatan dan belum diberlakukan reward kepada pegawai. Namun dari beberapa unsur Pengendalian Intern sudah berjalan dengan baik. Sebaiknya pimpinan DPPKAD meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, perekrutan juga kerjasama.